



## BAB III

### Tinjauan Umum Tentang Nafkah

#### A. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab نفقة – نفق – نفق yang berarti الإخراج,<sup>23</sup> kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja.<sup>24</sup> Nafkah juga diartikan sebagai barang yang dibelanjakan, menafkahkan, rezeki, belanja buat makan hidup.<sup>25</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.<sup>26</sup> Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.<sup>27</sup> Dikamus ilmiah populer nafkah atau nafkah berarti barang-barang yang dibelanjakan, belanja, penghidupan, dan rezeki.<sup>28</sup>

Nafkah menurut istilah terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu :

<sup>23</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid. 4 (Bairut: Dar al-Fikr. 1990), hlm. 820.

<sup>24</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V, hlm. 151.

<sup>25</sup> Idris Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt). hlm. 236.

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al-Munawir, 1984), hlm. 1548.

<sup>27</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, hlm. 770.

<sup>28</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), cet. pertama, hlm. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Abdur Rahman Al-Jazairy, nafkah adalah :

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبزا و آدم و كسوة و سكن  
و ما يتبع ذلك من ثمن مأ و دهن و مصباح و نحو ذلك

*“kewajiban seseorang mengeluarkan belanja sebagai kebutuhan hidup yang meliputi roti, lauk pauk, pakaian, tempat, dan apa saja yang berkaitan dengan itu, seperti minyak, air alat penerangan dan sebagainya”.*<sup>29</sup>

2. Menurut Ash-Shan’any, nafkah adalah :

نفقات الذى يبذل له الانسان فيما يحتاجه وهو او غير من الطعام والشرب و  
غيرهما

*“Nafkah adalah sesuatu yang diberikan manusia terhadap apa-apa yang dibutuhkan dirinya sendiri atau orang lain, berupa makanan, minuman dan sebagainya.”*<sup>30</sup>

3. Menurut Ulama Syafi’iyah, nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya dan sebagainya, berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.<sup>31</sup>

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut diatas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi

<sup>29</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah*, IV, (Beirut: Tajariyah Kubra, 1969), hlm. 553.

<sup>30</sup> Ash-Shan’any, *Subulu Al-Salam*, (Mesir: Tajariyah Kubra, tt), jilid III, hlm. 218.

<sup>31</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’iyi*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 461.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan orang lain yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan.

Pada dasarnya ada tiga macam kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pangan, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.<sup>33</sup> Selain ketiga kebutuhan pokok tersebut, masih ada lagi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk nafkah orang lain terutama anak harus mencakup semua kebutuhan pokok dan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan seumpamanya.

Pemberian nafkah bagi seorang ayah untuk keluarga dan anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kemampuan ayah tersebut. Bahkan sangat penting sekali, bila seorang ayah menghendaki anak-anak mempunyai pendidikan yang layak dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, seorang ayah harus memelihara segala kebutuhan hidup lainnya yang bersifat skunder.

<sup>32</sup> Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, (Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, 2017), Vol. 2, No. 1, hlm. 31.

<sup>33</sup> Muhd.Jawwad Mugniyah, *Ahwal Al-Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Ilmy li al-Malayin, tt), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dasar Hukum Nafkah

Hubungan Perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Islam mengajarkan bahwa suami (ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara yang makruf.<sup>34</sup> Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang nafkah dalam Islam dalam penjelasan nash, serta dasar-dasar hukum tentang nafkah dalam peraturan konstitusi yaitu :

### a. Dasar Nafkah Dalam Hukum Islam

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang nafkah di dalam hukum Islam yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Kewajiban pemberian nafkah ini terlihat dalam teks Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ<sup>ع</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ع</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ<sup>ع</sup>  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm.108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup> (Al-Baqarah : 233)*

Setelah Allah ﷻ menyebutkan tentang pernikahan dan perceraian pada ayat yang sebelumnya, Allah ﷻ pun menyebutkan tentang anak, sebab terkadang suami isteri berpisah setelah mereka memiliki anak. Dengan demikian ayat ini berbicara tentang wanita-wanita yang diceraikan dan telah memiliki anak dari suami-suami mereka. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi, Adh-Dhahhak dan lainnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ayat Al-Baqarah 233 menjelaskan maksud ayat yaitu, merekalah (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.<sup>36</sup>

Ayat ini juga menunjukkan bahwa walaupun anak sudah disapih, tetap saja ibu yang lebih berhak mengasuhnya karena kasih sayang yang

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan*, (Jawa Barat: Sygma, 2007), hlm. 37.

<sup>36</sup> Imam Qurthubi, *Terj. Fathurrahman, dkk, Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), Jilid. III, hlm. 341-345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh seorang ibu. Akan tetapi hak untuk mengasuh ini apabila isteri (ibu anak, maksudnya budak yang digauli oleh tuanya, lalu melahirkan anak) tidak menikah dengan orang lain, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Di dalam tafsir jalalain juga dijelaskan mengenai surah Al-Baqarah ayat 233, pada ayat yakni pada ayat :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (Al-Baqarah : 233)*

Yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.<sup>37</sup>

Pada penggalan ayat lain surah Al-Baqarah juga dijelaskan perihal nafkah anak dalam

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

*“Dan waris pun berkewajiban demikian”. (Al-Baqarah: 233)*

<sup>37</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-Nuzulnya*, Jilid II (Bandung : Sinar Baru, 1990), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud ialah tidak boleh menimpakan mudarat kepada ahli waris (kaum kerabat) pihak ayah si bayi. Demikianlah pendapat Mujahid, Asy-Sya'bi, dan Ad-Dahhak.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah 'kepada ahli waris diwajibkan hal yang sama dengan apa yang diwajibkan atas ayah si bayi, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi, memenuhi semua hak-haknya, dan tidak menimpakan mudarat kepadanya. Penakwilan yang terakhir ini menurut jumhur ulama.

Ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa kaum kerabat wajib memberi nafkah sebagian diantara mereka kepada sebagian lainnya. Pendapat ini bersumber dari riwayat yang diceritakan oleh Umar ibnul Khattab r.a. dan kebanyakan ulama Salaf.<sup>38</sup>

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup, dan tidak boleh bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya dalam hal ini tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh As-Sauri dan lain-lainnya. Pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya; dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, mengingat Dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara

---

<sup>38</sup> Imam Qurthubi, *Op.Cit.*, hlm. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak mereka berdua, dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi masalah bagi kedua orang tua, juga masalah si anak.<sup>39</sup>

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsir fathul qadir dalam menafsirkan ayat 233 pada surah Al-Baqarah yaitu pada lafaz :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu”*

Dalam tafsir fathul qadir dijelaskan, yakni ayah si anak. Penggunaan lafaz ini, dan tidak digunakannya lafaz الْمَوْلُودُ وَعَلَى (dan kewajiban orang tua), menunjukkan bahwa anak-anak adalah milik para ayah, bukan para ibu karena itulah mereka dinasabkan kepada ayah, bukan kepada ibu, sehingga seolah-olah para ibu hanya melahirkan anak untuk para ayah.

Yang dimaksud *ar-rizq* di sini adalah makanan yang diakui oleh manusia (dipandang baik dan memadai). Dan yang dimaksud dengan *al-Kiswah* juga pakaian yang diakui manusia. Ayat ini menunjukkan diwajibkannya hal tersebut atas para ayah untuk ibu anak-anaknya yang menyusui anak-anaknya. Ini berkaitan dengan para wanita yang ditalak, adapun bagi yang tidak di talak, maka sudah jelas bahwa nafkah dan

<sup>39</sup> Imam Qurthubi, *Op.Cit.*, hlm. 348.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian mereka merupakan kewajiban suami, bahkan sekalipun mereka tidak sedang menyusui anak-anak mereka.<sup>40</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan lafaz المولود له adalah suami, sedangkan lafaz رزقهن adalah makanan yang cukup. Lafaz المعروف dalam ayat diatas adalah kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yaitu tidak kekurangan dan tidak pula terlalu berlebihan.<sup>41</sup>

Dasar hukum nafkah yang lain adalah terdapat di dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Thalaq : 7)

Di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwasannya, hendaklah orang tua si bayi atau walinya memberi nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya.<sup>42</sup> Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah ﷻ dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yaitu :

<sup>40</sup> Imam Asy-Syaukani, Terj. Amir Hamzah, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), jilid. I, hlm. 940-941.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Quwait: Al-Adab, tt.), jilid II, hlm. 168.

<sup>42</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyutti, *Op. Cit.*, hlm. 540.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir". (Al-Baqarah : 286)

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Imam As-Syaukani di dalam tafsir fathul qadir menjelaskan tentang surah At-Talaq ayat 7 سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لَيْنَفَقَ yakni disini terkandung perintah bagi orang-orang yang memiliki kelapangan

<sup>43</sup> Jumni Nelli, *Op.Cit.*, hlm. 32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rezeki agar memberi kepada wanita mereka yang menyusui anak mereka sesuai dengan kemampuan mereka.

Abdul bin Humaid meriwayatkan dari Abu Sinan, dia berkata Umar bin Khaththab menanyakan perihal Abu Ubaidah, lalu dikatakan kepadanya, bahwa dia mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang kasar pula. Umar lalu mengirimkan seribu dinar kepadanya dan berpesan kepada utusannya, lihat apa yang dilakukannya dengan ini bila dia mengambilnya. Abu Ubaidah pun mengenakan pakaian yang sangat halus dan memakan makanan yang sangat baik. Utusan itu lalu kembali (kepada Umar) dan memberitahukan hal tersebut, maka Umar berkata, semoga Allah ﷻ merahmatinya. Dia menakwilkan ayat 7 pada surah At-Talaq yakni :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.*<sup>44</sup>

Pada ayat di atas juga menjelaskan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan dalam keadaan hamil hingga melahirkan. Penegasan ini sangat berguna terutama untuk menjaga keselamatan anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu, para

<sup>44</sup> Imam Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, jilid XI, hlm. 410-411.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu yang sedang hamil tersebut sangat membutuhkan makanan yang bergizi melebihi dari ketika ia tidak hamil. Dalam ayat di atas, juga terlihat perintah kepada ayah untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak yang sedang menyusui, dan jika isteri telah diceraikan maka ia berhak menerima upah penyusuan dari bekas suaminya.

#### b. Hadits

Selain al-qur'an, dasar adanya nafkah ini dijumpai dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Aisyah ra, bahwasannaya Hindun binti Utbah pernah bertanya: Wahai Rasulullah ﷺ: Sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepada aku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya harta tanpa sepengetahuannya. Rasulullah ﷺ menjawab, Ambilah dari apa yang mencukupi bagi mu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”.<sup>45</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan, isteri dan anaknya, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Oleh

<sup>45</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Daru wamathaba'iy al-sya'by, tt), Juz IV, hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.<sup>46</sup>

Selain itu, dijumpai pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَّمِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya: wahai Rasulullah, aku punya dinar. Rasulullah ﷺ berkata: Nafkahkanlah untuk diri engkau. Kemudian sisanya ? jawab Rasulullah ﷺ, nafkahkan untuk anak engkau. Kemudian sisanya nafkahkan untuk keluarga, dan khadam engkau”.<sup>47</sup> (HR. Muslim)

Di dalam kitab subulussalam tentang bab nafkah ini dijelaskan tentang urutan prioritas pihak-pihak yang nafkah kebutuhannya harus ditanggung oleh seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab, dan hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang yang mempunyai tanggungan.

<sup>46</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 175.

<sup>47</sup> Ash-Shan'any, *Op.Cit*, hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan terhadap anak-anaknya, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang ayah, baik tanggung jawab primer maupun yang bersifat skunder yang diperlukan oleh anak.

Mengenai kadar (jumlah) nafkah yang harus dikeluarkan, harus diukur menurut kebutuhan anak yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua (ayah). Oleh sebab itu, jumlah nafkah yang dikeluarkan dapat saja berbeda zaman, tempat dan keadaan ekonomi sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah ﷻ dalam surah Al-Baqarah ayat bahwa “seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Dengan memperhatikan keterangan di atas, terlihat bahwa nafkah itu mesti dikeluarkan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya, meskipun dalam keadaan sulit sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah bagi seorang ayah terhadap anak-anak mempunyai batas-batas tertentu, yaitu bila anak sudah dewasa dan mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Bila anak itu perempuan, nafkahnya menjadi kewajiban ayah sampai ia dikawinkan, kecuali bila ia telah bekerja dan berpenghasilan cukup, serta pekerjaan yang dilakukannya bukan karena terpaksa.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Mu’ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980), hlm. 181.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Undang-Undang

Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikirkan biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>49</sup>

Pasal di atas menjelaskan bahawa bila terjadi perceraian diantara suami isteri, terutama yang sudah mempunyai anak, maka suami isteri atau ibu dan bapak itu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan dan masa depan anak itu sendiri. Bila ibu dan bapak yang bersangkutan bersengketa tentang pengasuhan anak, maka sengketa tersebut harus diajukan dan diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Mengenai biaya (nafkah) anak, Pengadilan Agama dapat membebarkannya kepada ibu (mantan isteri), jika bapak (mantan suami) dalam keadaan tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Pengadilan juga dapat memutuskan mengenai biaya-biaya yang harus di tanggulangi oleh suami maupun bekas isteri sesuai dengan kebutuhan anak sehari-hari.

Kewajiban orang tua yang jelas termaktub dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 adalah sebagai berikut:

<sup>49</sup> Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.<sup>50</sup>

Mengenai sengketa yang terjadi dalam penguasaan anak (hak hadhanah), dapat diajukan segera bersamaan dengan nafkah anak, isteri maupun harta bersama diwaktu permohonan cerai talak. Hal ini berdasarkan undang-undang Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Pasal 66 ayat (5) menyebutkan bahwa :

“permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai thalak atau sesudah ikrar thalak diucapkan”.<sup>51</sup>

Bila terjadi cerai gugatan yang diajukan oleh penggugat (isteri), maka atas permohonan penggugat, pengadilan juga dapat menentukan nafkah sebagaimana disebutkan pada pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut :

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

<sup>50</sup> Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 14, hlm. 4.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Proyek Departemen Agama RI, 1990), hlm. 23.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.<sup>52</sup>

Undang-undang juga menetapkan batas-batas kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh ibu dan bapak serta hubungan timbal balik antara orang tua (ibu dan bapak) terhadap anak-anaknya. Peraturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal 45 dari undang-undang itu menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>53</sup>

Dari pasal diatas terlihat bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sejak anak itu berada dalam janin ibu sampai mereka dikawinkan, baik anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan, kecuali bila mereka sudah dapat mencarinya, hidup secara mandiri. Kewajiban tersebut tidak hanya selama orang tuanya diikat oleh perkawinan, tetapi terus berlangsung sampai anak tersebut menjadi dewasa. Manakala pasangan suami isteri telah bercerai, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab sang ayah sekalipun anak tersebut tidak mengikut kepada ayahnya. Pengadilan dapat menetapkan biaya untuk itu dari ayahnya. Ketentuan ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 156 huruf (f) berbunyi :

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>53</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hlm. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya”.<sup>54</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang tua (ayah dan ibu) mempunyai kewajiban secara mutlak untuk menafkahi dan memelihara anak. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak tersebut sudah menikah atau sudah mampu berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### C. Penyebab Timbulnya Nafkah dan Macam-macamnya

Menurut Abdur Rahman Al-Jaziry, penyebab timbulnya nafkah itu adalah :

1. Karena hubungan perkawinan
2. Karena hubungan kerabat
3. Karena pemilikan.<sup>55</sup>

Menurut Zakariyya Al-Anshari, penyebab timbulnya nafkah adalah :

1. Seseorang yang mempunyai hubungan nasab
2. Seseorang yang mempunyai hak atas perkawinan, hak memiliki budak atau sesuatu yang lain.<sup>56</sup>

Dengan adanya hubungan perkawinan, Islam mewajibkan kepada suami untuk membiayai isterinya, dan isteri menjadi terikat kepada suaminya. Isteri juga wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Peradilan Agama, 1990), hlm. 37.

<sup>55</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Op.Cit.*, hlm. 553.

<sup>56</sup> Zakariyya Al-Anshari, *Takhfatu Al-Tullab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt), hlm.111.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memelihara maupun mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri selama ikatan perkawinan belum putus, dan selama isteri tidak durhaka atau sebab-sebab lain yang dapat menghalangi menerima nafkah.<sup>57</sup>

Suami atau seorang ayah juga berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban seorang ayah dalam memberi nafkah memerlukan syarat-syarat sebahai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau seorang perempuan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak.<sup>58</sup> Kemampuan nafkah ini terlihat dalam hadis Nabi

Muhammad ﷺ yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>58</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata ia. Rasulullah berkata kepada kami : Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Barang siapa yang tidak mapu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa itu merupakan penawar”<sup>59</sup> (HR.Bukhari).

Hadits ini berisi anjuran untuk selalu mencari solusi yang bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan juga menerangkan, bahwa melakukan pernikahan tidak membebani seseorang dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan, apalagi sampai berhutang. Maka, Al-Qarafi berhujjah bahwa puasa dengan niat pengendalian diri merupakan dasar hukum yang membolehkan ibadah dengan dua niat sekaligus, lain halnya beribadah karena riya', akan tetapi dia menambahkan, hal ini apabila amalan yang kedua adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang pertama; karena dengan berpuasa akan membentengi diri dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sedangkan menggabungkan niat pada amalan mubah seperti seorang yang melaksanakan shalat sekedar memenuhi panggilan, hal ini masih diperdebatkan: mungkinkah diqiyaskan dengan hal tersebut di atas? Tetapi kemungkinan qiyasnya tidak sah. Jika seorang yang melaksanakan shalat

<sup>59</sup> Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, kitab An-Nikah (pernikahan); Bab Nikah; Hadits No. 993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berniat meninggalkan perbuatan batil atau ghibah; maka hal ini sah menjadi tujuan didirikannya shalat.<sup>60</sup>

Dari hadis di atas terlihat bahwa kemampuan memberi nafkah terhadap seseorang yang dikawini (isteri) merupakan faktor utama untuk dapat melaksanakan perkawinan. Seandainya seseorang pemuda belum mampu menunaikan kewajibannya, sebaiknya mereka menunda pernikahan. Penegasan ini sangat berguna untuk mencapai tujuan perkawinan yang dianjurkan Allah ﷻ agar mendapatkan keturunan yang sejahtera lahir dan bathin.

Mengenai nafkah dalam hubungan kerabat, para ulama berbeda pendapat terhadap lingkungan kerabat yang wajib di nafkahi. Menurut Ulama Malikiyah, lingkungan kerabat yang wajib diberi nafkah hanya terfokus kepada dua orang tua (ayah dan ibu) serta anak kandung saja. Maksudnya, bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, sedangkan anak wajib pula memberi nafkah kepada orang tuanya bila sudah dewasa, mampu serta berpenghasilan yang layak.<sup>61</sup>

Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa lingkungan kerabat wajib diberi nafkah didasarkan kepada keturunan (nasab). Ini berarti bahwa seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan

<sup>60</sup> Ash-Shan'aniy, *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalu Al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al- Fikr Al-Araby, 1957), hlm. 485.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya keatas. Sebaliknya, ayah juga wajib memberi nafkah kepada anaknya, cucu, dan seterusnya kebawah.<sup>62</sup>

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa lingkungan kerabat yang wajib diberi nafkah adalah didasarkan kepada kerabat yang diharamkan melakukan perkawinan (muhrim).<sup>63</sup> Misalnya, anak kandung anak tiri yang ibunya telah di campuri dan sebagainya. Adapun Ulama Hanabillah menetapkan bahwa lingkungan kerabat yang wajib diberi nafkah adalah didasarkan kepada sistem pewarisan. Bila diantara mereka mempunyai hubungan saling mewarisi, maka diwajibkan bagi yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya.<sup>64</sup>

Selain keempat pendapat yang dikemukakan diatas, masih ada lagi pendapat lain yang dikemukakan oleh Mustafa As-Syiba'iy. Menurutnya, orang yang wajib menerima nafkah dari pihak kerabat adalah :

1. Kerabat furu', yaitu anak, cucu, dan seterusnya kebawah.
2. Kerabat ushul, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya.
3. Kerabat samping (hawasyi), yaitu saudara, bibi, dan paman.<sup>65</sup>

Dari uraian diatas terlihat bahwa meskipun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan lingkungan kerabat yang wajib diberi nafkah, namun

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup> Mustafa Asy-Syiba'iy, *Al-Ahwalu Al-Syakhshiyah*, (Damaskus : Tijariyah Kubra, tt), Juz I, hlm. 335.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sepakat menetapkan bahwa anak termasuk kerabat yang wajib diberi nafkah.

Seperti diketahui bahwa setiap manusia membutuhkan sesuatu tertentu.

Kebutuhan tersebut pada dasarnya dibagi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang diperlukan manusia dapat dibagi kepada kebutuhan pokok dan tambahan (pelengkap).

Kebutuhan pokok (primer) menurut Abdur Rahman Al-Jaziry adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>66</sup> Sebagian ulama menetapkan bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah makan (pangan) saja.<sup>67</sup> Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan kerabat (anak), maka kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok yang minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kemampuan orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Makanan yang menjadi kebutuhan pokok itu harus halal dan baik sebagaimana di tegaskan oleh Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

<sup>66</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Op.Cit.*, hlm. 554.

<sup>67</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Proyek Depag RI, 1984), hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".<sup>68</sup> (QS. Al-Baqarah :168)

Makanan yang menjadi kebutuhan pokok itu adalah beras, jagung, sayur-mayur, daging, roti, dan sebagainya sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Kesemua kebutuhan tersebut ditetapkan dalam batas-batas yang ma'ruf sesuai dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Makanan yang ditetapkan sebagai kebutuhan pokok adalah sebagai bahan bakar dalam tubuh seseorang, karena dalam kenyataannya orang akan lemah dan tidak bisa bekerja bila perutnya lapar. Bila seseorang itu kenyang, maka ia akan bekerja dengan penuh semangat dan baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aisyah Dahlan sebagai berikut :

"Faktor utama dalam membina keluarga adalah nafkah. Bila terpenuhi kebutuhan sehari-hari, akan sejahteralah keluarga tersebut, karena ia hidup membutuhkan makanan, minuman dan sebagainya".<sup>69</sup>

Semakin maju suatu masyarakat, maka akan semakin banyak dan kompleks pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bila masa dahulu orang sudah puas jika dapat menjaga dirinya dari kedinginan dan kepanasan, saat ini kebutuhannya meningkat kepada kesetabilan udara dengan menggunakan alat-alat yang mutakhir. Akan tetapi, kebutuhan ini hanya bersifat skunder yang pelaksanaannya tergantung kepada kemampuan ayah sebagai penanggung jawab nafkah. Bila anak sangat membutuhkan, sementara ayah mampu untuk menyediakannya, maka ayah harus memenuhi kebutuhan tersebut.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 41.

<sup>69</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta : Yamunu, 1969), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kebutuhan jasmani berupa material, manusia juga membutuhkan keperluan hidup yang bersifat immaterial. Kebutuhan immaterial (rohani) adalah kebutuhan bathin yang mengembara dalam jiwa seseorang yang harus diperhatikan, karena rohani itu merupakan hakikat yang sebenarnya dari kehidupan manusia. Kebutuhan rohani itu merupakan hakikat yang sebenarnya dari kehidupan manusia. Kebutuhan rohani ini jika di lalaikan, akan mengakibatkan manusia menjadi kebingungan dan diliputi krisis dalam segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu, Allah ﷻ telah memberikan pedoman hidup kepada manusia dengan jalan menuntut ilmu pengetahuan. Urgensinya mengetahui sesuatu telah diisyaratkan dalam al-Qur'an pada surah al-Alaq ayat 1-5 :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.*<sup>70</sup> (Al-Alaq : 1-5)

Bila manusia itu tidak mengetahui sesuatu, berarti fitrah dan harkat manusia yang bersangkutan menjadi lenyap, dan akan kehilangan pedoman hidup. Dengan demikian orang tua terutama ayah wajib memberikan pendidikan kepada anaknya guna untuk memenuhi kebutuhan rohaninya.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 1079.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Nafkah Anak dan Urgensinya

Barangsiapa yang masih ingin hidup di dunia, berarti ia masih ingin diuji karena kehidupan tak lepas dari ujian. Barangsiapa yang ingin selalu hidup tentram dan senang tanpa ada ujian sama sekali, sungguh ia telah mengharapkan kemustahilan. Bahkan, pada hakikatnya ia sedang mengharapkan kematian.

Ternyata setelah kematian pun, di lam kubur dan di padang Mahsyar masih ada ujian berat yang menanti. Tidak ada peristirahatan yang hakiki, kecuali surga.<sup>71</sup>

Islam membebankan nafkah anak bagi ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak tersebut kepada ibunya. Ketetapan ini sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;*

<sup>71</sup> Ibnu Basyar, *Menjadi Bijak & Bijaksana*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>72</sup>

Ulama sepakat menetapkan tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Perbedaan pendapat ulama adalah tentang batas-batas nafkah ayah terhadap anaknya. Menurut Ulama Hanfiah, anak laki-laki yang wajib diberi nafkah harus:

1. Anak itu fakir (tidak mempunyai harta),
2. Belum dewasa,
3. Merdeka (tidak dikuasai orang lain).<sup>73</sup>

Bila anak tersebut perempuan yang masih kecil, maka syaratnya harus merdeka, dan tidak memiliki harta. Sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa, dan belum menikah masih tetap menjadi tanggungan ayah untuk memberi nafkah.<sup>74</sup>

Menurut Ulama Malikiyah, ayah wajib memberi nafkah kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan dengan syarat :

1. Anak itu fakir (tidak mempunyai harta),
2. Belum bekerja meskipun sudah dewasa,
3. Merdeka (tidak dikuasai orang lain),
4. Ayah harus mampu memberi nafkahnya (mempunyai harta).<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 946.

<sup>73</sup> Abdur Raman Al-Jaziry, *Op.Cit.*, hlm. 585.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ibu tidak diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya meskipun ia mampu, hanya saja diwajibkan baginya untuk menyusukan anaknya tanpa diberi upah.<sup>76</sup>

Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah bagi anak laki-laki harus terpenuhi salah satu syarat dari tiga persyaratan, yaitu:

1. Anak itu masih kecil (belum dewasa),
2. Anak itu fakir (tidak mempunyai harta),
3. Anak itu merdeka (tidak dikuasai orang lain).<sup>77</sup>

Bila anak itu perempuan, maka nafkahnya wajib diberikan sampai ia kawin. Bila anak perempuan itu sudah ada jodonya, tetapi ia menolak untuk dinikahkan, maka menurut satu qaul (pendapat) gugur kewajiban ayahnya, dan menurut pendapat lain dalam mazhab Syafi'iyah tetap menjadi kewajiban ayah.

Artinya, nafkah anak yang menolak dinikahkan itu wajib ditanggung oleh ayahnya.<sup>78</sup>

Ulama Hanabillah mengemukakan bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat bahwa :

1. Anak itu fakir (tidak mempunyai harta),
2. Ayah harus memiliki harta,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 586.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 587.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Ayah dan anak harus merdeka.<sup>79</sup>

Sedangkan Mahmud Yunus mensyaratkan bahwa anak itu masih kecil (belum dewasa), dan juga tidak memiliki harta untuk menafkahi dirinya sendiri.<sup>80</sup>

Adapun Nafkah yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah:

1. Pangan, yaitu kebutuhan makan, minum dan sabagainya,
2. Pakaian, yaitu segala yang dibutuhkan untuk menutup aurat serta menjaga dari gangguan alam,
3. Obat-obatan, yaitu segala sesuatu yang di perlukan untuk menjaga kesehatan anak.<sup>81</sup>

Adapun Ulama Hanafiyah tidak memasukkan pengobatan kedalam kewajiban nafkah ayah terhadap anak, tetapi hanya bersifat kemanusiaan dan tolong menolong dalam kebiasaan. Sedangkan Ulama Syafi'iyah memasukkan biaya pengobatan, dan setiap yang berhubungan dengan kesehatan sebagai kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan.<sup>82</sup>

Nafkah yang diberikan orang tua (ayah) kepada anak bertujuan untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Memelihara dimaksudkan dalam kerangka yang luas, yaitu mencakup pemeliharaan anak secara lahir dan batin.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 588.

<sup>80</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1970), hlm. 112.

<sup>81</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 557-558.

<sup>82</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeliharaan yang pertama yang dilakukan orang tua adalah menyangkut dengan pertumbuhan jasmani anak, dalam hal ini orang tua berupaya agar anaknya bisa tumbuh dengan sehat dan kuat, dan kemudian dengan memberikan pendidikan jasmani serta rohani kepada anak. Perlunya kesehatan dan kekuatan bagi seseorang, digambarkan oleh hadis Nabi ﷺ yang di riwayatkan oleh Muslim:

Maknanya :”Dari Abu Hurairah ra, berkata Nabi ﷺ : orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai Allah ﷻ dari orang mukmin yang lemah.”<sup>83</sup>

Dari uraian yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, baik berupa pangan, sandang maupun pengobatan serta pendidikannya. Pentingnya memberikan nafkah adalah dalam rangka keselamatan mereka, baik lahir maupun batin.

### **E. Nafkah Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama**

Pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Berdasarkan Pasal 45 (1) Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Fenomena meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan menunjukkan meningkat kemampuan perempuan dalam membela haknya. Sementara itu, gugatan perceraian juga seringkali menimbulkan beban baru bagi perempuan terutama berkenaan dengan kehidupan si anak. Suami yang digugat di pengadilan

<sup>83</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir : Maktabah Daru Al-Sya’by, tt), hlm. 520.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali melepaskan tanggung jawabnya begitu saja terhadap kelangsungan hidup anak.<sup>84</sup> Juga terdapat dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada Bab VIII pasal 41 dari undang-undang menyatakan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>85</sup>

Untuk terlaksananya pemberian nafkah sehubungan terjadinya perceraian antara suami dan isteri, maka pihak Pengadilan Agama dapat menentukan hal-hal tersebut sejalan dengan berlangsungnya gugatan perceraian.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi :

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

<sup>84</sup> Abdul Manan, dkk, *Majalah Peradilan Agama*, (Jakarta Pusat : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), edisi 9, hlm. 20.

<sup>85</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta, 1975), hlm. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan nafkah yang di tanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”<sup>86</sup>

Mengenai hal nafkah anak oleh mantan suami diatur di dalam pasal 8 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 pada ayat 2 dan 4 tentang akibat perceraian, menyebutkan :

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *UUPA NO. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Proyek Peradilan Agama, 1989) , hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi mantan isteri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 10 tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Jika dalam kasus perceraian mantan suami adalah seorang PNS, maka mantan isteri dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan agar gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada mantan isteri dan anak-anaknya.

Apabila mantan suami bukanlah PNS/Anggota TNI/Polri, berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mantan isteri bisa mengajukan gugatan atas tidak dipenuhinya tunjangan anak ke Pengadilan Agama di mana mantan isteri berdomisili.<sup>87</sup>

Ada sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk optimalisasi peran peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak akibat perceraian yang terjadi atas kedua orang tuanya.

1. Tujuan kepentingan anak (*the best interest of the child*) harus diutamakan dan menjadi prioritas dalam produk pengadilan (putusan/penetapan).

<sup>87</sup> Letezia Tobing, *Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, artikel di akses pada tanggal 25 Desember 2017 dari [http:// M.Hukumonline.Com /Klinik /Detail/Lt4d7987f46851a/ Langkah- Hukum- Jika- Mantan-Suami-Menolak-Menafkahi-Mantan-Istri](http://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4d7987f46851a/Langkah-Hukum-Jika-Mantan-Suami-Menolak-Menafkahi-Mantan-Istri).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi yang menghambat pemenuhan hak-hak anak harus dikesampingkan.

2. Harmonisasi antar regulasi mutlak perlu dilakukan. Ini tentu bukan hanya tugas peradilan agama, lembaga pembuat undang-undang berkewajiban mewujudkannya. Selama itu belum terwujud, langkah yang dilakukan oleh hakim peradilan agama adalah melakukan interpretasi sistematis dan teologis agar perlindungan hak anak tetap ditegakan.
3. Untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, diperlukan pelatihan berkesinambungan bagi aparat penegak hukum di peradilan agama agar selalu *well-informed* dengan perkembangan terkini dalam perkara perlindungan hak anak. Terakhir, diperlukan adanya kajian komparatif dengan negara-negara yang lebih berhasil dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya.<sup>88</sup>

Aturan hukum yang ada di Peradilan Agama dari segi fungsinya terdiri dari hukum materiil dan hukum formil. Sumber-sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum dibedakan atas dua jenis yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan ini suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang, serta merupakan faktor yang menentukan materi berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.<sup>89</sup> Hukum formil

<sup>88</sup> Abdul Manan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>89</sup> Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), hlm. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil<sup>90</sup>. atau sering disebut hukum acara. Mengenai hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut:

*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*<sup>91</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yakni HIR/RBg. Berlakunya HIR/RBg tersebut tidak untuk semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi hanya berlaku atas perkara yang hukum acaranya belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap perkara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka aturan hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg tidak berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Adapun perkara yang hukum acaranya sudah diatur oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1989 adalah dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dan alasan *zina*.<sup>92</sup>

Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

<sup>90</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

<sup>91</sup> Yayasan Al-Hikmah, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989, Pasal 54*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 301.

<sup>92</sup> Domiri, *Analisis Tentang Sistem Peradilan di Indonesia*, (Palembang : Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2016), hlm. 331-332.

tentang Peradilan Agama tersebut. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Umum di berlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv);
2. Inlandsh Reglement (IR);
3. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg);
4. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW);
5. Wetboek van Koophandel (WvK);
6. Peraturan Perundang-undangan :
  - a. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentan Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa, Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg;
  - b. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 terakhir dan keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
  - d. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut;
- f. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI Intruksi Presiden RI untuk Masyarakat;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
8. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan.<sup>93</sup>

Dalam peraturan perundangan tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Para ayah memperoleh peluang untuk bebas dari tanggung jawab menafkahi anak. Misalnya dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri. Kewajiban bersama ini semakin ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3). Pada pasal 80 ayat (4) huruf b dan c KHI dikemukakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan anak. Ayah juga bertanggung jawab menanggung biaya penyusuan anaknya yang diatur dalam pasal 104 KHI. Juga terdapat dalam pasal 156 huruf (d) KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, semua biaya hadhhanak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

<sup>93</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.161-165.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri berusia 21 tahun.<sup>94</sup>

Bagaimanapun juga, seorang ibu akan berupaya mati-matian untuk menafkahi, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Kebanyakan tidak demikian yang terjadi pada para ayah sebagai akibat pemanfaatan peluang kelonggaran peraturan perundangan yang mengikat mereka. Ketika para ayah ini tidak mampu, mereka bisa sampai pada titik itu dan posisi anak yang wajib ditanggung tidak menjadi perhatian. Tidak demikian ketika ibu dibebankan peraturan perundangan untuk memikul nafkah anaknya.

<sup>94</sup> Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), hlm.